



Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung)

Raafi Melati Putri ¹, Indri Yuliafitri ²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: melatiraafi@gmail.com indri.yuliafitri@unpad.ac.id

Abstract *The broad principles of autonomy in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia grant the right to local regions to manage their own affairs, adapting policies to local characteristics and needs, thereby enhancing the effectiveness, efficiency, and accountability of governance at the local level. The management of local finances involves a series of actions carried out by financial management officials, including planning, implementation, monitoring, and accountability for these tasks. In the past five years (2019-2022), the City of Bandung government has analyzed the effectiveness and efficiency of the utilization of operational expenditure budgets by its departments. This budget is crucial in improving the quality of public services and meeting community needs, serving as a focal point for the evaluation of the city government's financial performance. The realization of Bandung City's operational budget from 2019 to 2022 indicates a fairly effective level of effectiveness (84%). Despite falling slightly below the target, the percentage of effectiveness increased from 81% (2019) to 87% (2022). In terms of efficiency, the city managed to save operational budget with a "very efficient" rating (15%), achieving efficiency percentages ranging from 12% to 23% during this period.*

Keywords: *Operational Expenditure, Budget Effectiveness, Budget Efficiency, Bandung City Departments.*

Abstrak Asas otonomi yang luas sesuai dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia memberi hak kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri yang menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan setempat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas tugas-tugas tersebut. Pemerintah Kota Bandung, dalam lima tahun terakhir (2019-2022), menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja operasional oleh dinas-dinasnya. Anggaran ini krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menjadi fokus evaluasi kinerja keuangan pemerintah kota. Realisasi anggaran operasional Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup efektif (84%). Meskipun realisasinya cenderung lebih rendah dari target, persentase efektivitas meningkat dari 81% (2019) menjadi 87% (2022). Secara efisiensi, berhasil menghemat anggaran operasional dengan predikat "sangat efisien" (15%), dengan tingkat persentase efisiensi berkisar antara 12% hingga 23% selama periode tersebut.

Kata Kunci: Belanja Operasional, Efektivitas Anggaran, Efisiensi Anggaran, Dinas-Dinas Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menggunakan APBN untuk mendistribusikan dana ke daerah-daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan sebagian pendapatan negara dalam APBN untuk diberikan kepada pemerintah daerah melalui dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah masing-masing.

Anggaran pemerintah merupakan sebuah rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan dalam periode tertentu, yang biasanya dalam satu tahun fiskal dan bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya finansial yang tersedia agar dapat mencapai tujuan dan kebijakan pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam APBD, anggaran belanja

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 15, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Nurhaliza, runhaliza1@gmail.com

operasional memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja operasional harus mengacu pada prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

KERANGKA TEORITIS

Otonomi Daerah

Syarief Saleh mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberi setiap daerah hak untuk mengendalikan dan mengurus urusan sendiri. Sedangkan pendapat Benyamin Hoesein menggambarkan otonomi daerah sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang berjalan secara terpisah dari pemerintahan resmi, tetapi masih berada dalam batas-batas negara. Dan dalam kutipan dari Mariun, ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah daerah dalam membuat keputusan tentang pemanfaatan sumber daya daerah, dengan tujuan mendapatkan fleksibilitas dalam menghadapi permasalahan yang unik di wilayah tertentu. Namun, perspektif Philip Mahwood menyatakan bahwa daerah otonom merujuk pada wilayah yang memiliki pemerintahan independen yang memiliki kekuasaan yang merdeka, bukannya tergantung pada pemerintah untuk alokasi sumber daya material yang substansial. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah bertindak sesuai kebijakan pemerintah pusat. Era otonomi ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang timbul dalam pelaksanaan pemerintahan. Keberlakuan kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola kebutuhannya, serta memungkinkan pelaksanaan yang efisien dan berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dijalankan melalui suatu sistem yang menyatu, sebagaimana yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diputuskan setiap tahun melalui peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Harahap, 2020). Sedangkan (Hendra, 2018) berpendapat bahwa, pengelolaan keuangan daerah mencakup rangkaian keseluruhan tindakan yang diemban oleh pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan perannya, yang melibatkan langkah-langkah seperti merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dr. Rudy Badrudin menyatakan dalam karyanya pada tahun 2017 Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Anggaran

Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebagai upaya untuk membantu daerah mencapai tujuan pembangunan tahunan mereka. Kontribusi ini diukur dalam bentuk mata uang yang diberi persetujuan oleh DPRD dan dicatat dalam suatu dokumen hukum yang dikenal sebagai Peraturan Daerah. Definisi APBD, seperti dijelaskan oleh Halim (2017:230) Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk mengalokasikan dana. Dana ini diperoleh dari pendapatan umum negara dan dialokasikan untuk mendukung inisiatif wilayah yang sejalan dengan program nasional. Menganalisis pelaksanaan APBD yang sudah dihitung dan dijalankan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan fiskal pemerintah wilayah.

Pendapatan Daerah

Ketentuan Pasal 30 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perekonomian Daerah mengatur bahwa uang yang tidak dapat diselesaikan yang telah didepositokan ke rekening pajak wilayah dianggap sebagai pendapatan wilayah. Sementara itu, penerimaan lainnya dimasukkan ke dalam penerimaan pihak berwenang pajak nasional sesuai persyaratan yang diamanatkan oleh hukum. Pendapatan yang diperoleh dalam suatu wilayah dianggap sebagai kepunyaan wilayah tersebut dan tidak dapat mengakibatkan pengembalian. Setiap dana yang didepositokan dalam rekening kas wilayah yang meningkatkan keseimbangan dana dianggap sebagai penerimaan wilayah. Tata kelola, struktur, peran, dan informasi tentang sumber pendapatan wilayah diklasifikasikan sebagai pendapatan wilayah (Nurkholis dan Khusain; 2019).

Belanja Daerah

Pengeluaran daerah mencakup semua kewajiban wilayah yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran tertentu (sesuai UU 33 tahun 2004). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, pengeluaran daerah melibatkan segala belanja yang tercatat dalam Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi dana kas saat ini, dan merupakan kewajiban wilayah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dikembalikan oleh wilayah. Pengeluaran Pemerintah Daerah melibatkan seluruh tanggung jawab yang dimiliki Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam periode akuntansi yang sesuai. Dalam batasan ekuitas sebagai tanggung jawab wilayah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah mencakup semua penarikan dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak memerlukan pengembalian kepada wilayah, serta segala pengeluaran lain yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi suatu topik atau isu (Creswell, 2014). Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Tanpa menggambar perbandingan atau membentuk hubungan antar variabel, peneliti dalam penelitian deskriptif mengevaluasi nilai variabel independen. Penelitian deskriptif kuantitatif berguna ketika memberikan deskripsi terperinci tentang fenomena yang diamati, mengidentifikasi pola atau tren, dan memungkinkan generalisasi untuk populasi yang lebih besar. Namun, penelitian ini terbatas pada deskripsi dan analisis statistik sederhana dan tidak mungkin untuk menurunkan hubungan kausal antar variabel. (Sugiyono, 2019: 206).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena peneliti ingin menguji efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dinas di Kota Bandung dengan melihat dan mengkaji laporan keuangan dan laporan operasional akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif, peneliti berusaha mengumpulkan data numerik atau kuantitatif tentang variabel yang diamati. Variabel tersebut dapat dikumpulkan melalui survei, pengukuran, observasi atau dengan mengumpulkan data dari sumber lain yang tersedia. Lebih lanjut, Sulistyawati dkk (2022) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Anggaran Operasional Dinas-Dinas Kota Bandung Tahun 2019-2022

Anggaran operasional di dalam dinas pemerintahan adalah dokumen keuangan yang merinci estimasi pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan aktivitas harian suatu entitas pemerintah atau dinas selama periode anggaran tertentu, umumnya satu tahun fiskal. Fungsinya adalah untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi penggunaan dana publik dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga dapat memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan dari laporan anggaran operasional untuk 22 Dinas di Kota Bandung selama periode tahun 2019 hingga 2022.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Anggaran Operasional Pada
22 Dinas Kota Bandung Tahun 2019-2022

Nama Dinas	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dinas Pendidikan	Rp1.769.169.934.371.627	Rp1.388.764.732.589.700	Rp1.443.213.784.810.933	Rp1.248.804.941.090.100	Rp1.498.708.599.257.000	Rp1.366.731.479.405.500	Rp1.800.689.905.134.700	Rp1.518.811.547.989.300
Dinas Kesehatan	Rp1.031.114.846.513.860	Rp873.555.991.606.367	Rp1.111.982.568.454.761	Rp927.228.417.103.500	Rp1.404.839.749.657.600	Rp1.129.966.919.910.938	Rp1.483.387.444.447.500	Rp1.267.903.286.250
Dinas Pekerjaan Umum	Rp14.544.844.972.944	Rp12.974.717.045.000	Rp12.776.260.275.410	Rp11.257.386.518.400	Rp11.749.098.771.800	Rp10.687.665.074.400	Rp18.433.016.103.400	Rp17.248.826.631.900
Dinas Penataan Ruang	Rp7.224.216.366.333	Rp6.810.125.972.300	Rp7.471.136.697.526	Rp6.745.553.532.500	Rp6.398.972.902.300	Rp5.761.195.473.100	Rp7.361.380.513.900	Rp6.804.528.931.700
Dinas Perumahan	Rp13.791.922.792.285	Rp10.760.276.928.900	Rp11.878.621.896.226	Rp9.867.014.962.300	Rp12.057.929.322.600	Rp10.497.191.049.800	Rp16.821.746.610.400	Rp14.772.351.218.400
Dinas Satpol PP	Rp9.052.200.061.122	Rp8.459.534.567.100	Rp7.494.545.960.332	Rp6.826.107.797.800	Rp7.488.495.038.700	Rp7.027.130.835.700	Rp7.729.898.566.600	Rp7.238.043.626.200
Dinas Kebencanaan dan Penanggulangan Bencana	Rp5.812.929.605.883	Rp5.457.964.764.100	Rp4.576.652.511.277	Rp3.239.831.008.100	Rp4.505.077.656.700	Rp4.307.203.181.900	Rp5.237.136.759.900	Rp4.871.765.247.000
Dinas Sosial	Rp4.693.349.389.532	Rp3.842.911.024.500	Rp3.786.942.883.745	Rp3.196.865.494.700	Rp3.346.722.168.300	Rp3.013.691.134.600	Rp4.533.950.754.000	Rp4.225.257.192.200
Dinas Tenaga Kerja	Rp3.930.051.033.889	Rp2.665.143.546.000	Rp2.783.318.072.901	Rp2.180.770.344.000	Rp2.561.249.569.100	Rp2.221.954.302.800	Rp3.650.642.567.600	Rp3.369.627.805.000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp2.721.942.489.232	Rp2.508.671.964.400	Rp1.910.202.913.332	Rp1.701.760.248.900	Rp1.787.890.147.000	Rp1.615.269.976.600	Rp1.133.000.070.000	Rp1.013.660.070.500
Dinas Pangan Pertanian	Rp4.053.673.701.901	Rp3.847.247.806.500	Rp3.570.535.061.203	Rp3.109.181.610.300	Rp3.613.529.307.500	Rp3.276.489.887.300	Rp4.478.824.110.200	Rp4.086.617.335.200
Dinas Lingkungan Hidup	Rp10.680.804.006.830	Rp9.168.814.812.800	Rp10.101.576.344.899	Rp7.546.485.095.200	Rp5.923.383.342.400	Rp3.233.553.105.933.600	Rp2.870.220.404.100	Rp3.773.367.492.300
Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil	Rp3.769.210.219.063	Rp3.572.479.316.100	Rp3.278.976.703.751	Rp2.791.750.701.700	Rp2.720.039.018.200	Rp2.442.274.166.000	Rp3.371.805.618.000	Rp3.073.454.608.040
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Keluarga Berencana	Rp2.419.332.862.541	Rp1.889.676.743.100	Rp1.922.450.985.004	Rp1.602.747.808.700	Rp2.075.882.134.500	Rp1.691.705.187.700	Rp4.295.648.300.000	Rp3.460.458.776.400
Dinas Perhubungan	Rp14.796.607.523.052	Rp13.031.686.744.100	Rp19.176.810.207.643	Rp11.046.870.842.100	Rp15.114.924.721.300	Rp12.241.864.223.100	Rp19.543.014.749.400	Rp17.093.702.839.900
Dinas Komunikasi dan Informasi	Rp3.680.697.499.580	Rp3.292.285.653.500	Rp3.287.188.386.038	Rp2.895.832.204.900	Rp4.376.440.381.900	Rp3.934.799.854.700	Rp4.411.279.298.100	Rp3.151.690.681.400
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp2.636.025.434.814	Rp2.392.416.711.300	Rp1.498.116.889.674	Rp1.352.430.198.400	Rp2.330.369.403.100	Rp2.028.541.382.600	Rp3.074.638.912.800	Rp2.798.651.469.000
Dinas Penanaman Modal	Rp3.026.386.673.192	Rp2.878.077.964.600	Rp2.894.421.166.751	Rp2.415.339.425.100	Rp2.505.751.106.800	Rp2.263.853.664.500	Rp3.077.839.594.400	Rp2.799.878.968.800
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp11.169.445.968.504	Rp10.630.024.742.900	Rp3.451.260.532.980	Rp3.161.386.368.300	Rp10.633.796.090.500	Rp9.955.806.715.100	Rp19.014.368.432.800	Rp18.550.774.101.300
Dinas Budaya dan Pariwisata	Rp6.167.125.663.887	Rp5.701.633.078.300	Rp3.910.951.440.123	Rp3.154.954.778.900	Rp4.611.088.474.300	Rp3.973.873.337.000	Rp4.639.297.272.400	Rp4.256.587.584.500
Dinas Perpustakaan	Rp1.064.923.964.041	Rp1.898.616.413.800	Rp1.757.686.322.217	Rp1.609.107.981.200	Rp1.699.055.980.300	Rp1.534.778.788.600	Rp2.002.879.177.800	Rp1.918.536.930.800
Dinas Perdagangan	Rp3.274.241.637.720	Rp3.043.151.583.000	Rp3.402.338.740.016	Rp3.682.491.506.600	Rp3.193.899.760.100	Rp2.927.851.220.500	Rp3.128.355.529.800	Rp2.955.236.222.700

Sumber: BKAD Kota Bandung

Anggaran operasional untuk 22 dinas di Kota Bandung mencakup belanja pegawai dan belanja barang serta jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dinas. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran operasional untuk dinas-dinas tersebut mengalami fluktuasi dengan beberapa dinas mengalami peningkatan sementara yang lain mengalami penurunan. Perubahan anggaran operasional dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Beberapa faktor yang memengaruhi anggaran operasional, seperti yang dijelaskan oleh Bland & Nunn (1992), adalah sebagai berikut:

1. Inflasi: Salah satu faktor utama adalah inflasi, yaitu peningkatan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi menyebabkan biaya operasional pemerintah meningkat, termasuk biaya untuk menjaga layanan dan program yang ada.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah sering kali harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.
3. Peningkatan Permintaan Layanan Publik: Masyarakat mungkin mengharapkan layanan publik yang lebih baik dan lebih luas dari pemerintah dari waktu ke waktu. Permintaan akan layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan infrastruktur lainnya bisa meningkat seiring perubahan demografi dan harapan masyarakat.

4. Perubahan Sosial dan Kebijakan Publik: Perubahan dalam kebijakan publik, seperti peningkatan tunjangan sosial, dana pensiun, atau dukungan bagi kelompok-kelompok tertentu, dapat menyebabkan peningkatan dalam anggaran operasional.
5. Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi dan inovasi bisa memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, pengembangan sistem baru, atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga memerlukan anggaran tambahan.
6. Tuntutan Hukum dan Regulasi: Perubahan dalam hukum dan regulasi bisa mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mematuhi ketentuan baru atau untuk memastikan kepatuhan.
7. Keadaan Darurat atau Bencana: Bencana alam, krisis kesehatan, atau situasi darurat lainnya dapat memaksa pemerintah untuk mengalokasikan dana ekstra untuk tanggap darurat, pemulihan, atau perlindungan masyarakat.
8. Kualitas dan Kuantitas Layanan: Meningkatnya standar kualitas layanan dan peningkatan jumlah layanan yang disediakan pemerintah, seperti perluasan akses layanan kesehatan atau pendidikan, bisa mengakibatkan kenaikan anggaran operasional.
9. Biaya Operasional yang Semakin Tinggi: Biaya operasional yang lebih tinggi karena kenaikan biaya bahan baku, upah pegawai, atau biaya energi juga bisa menyebabkan kenaikan anggaran operasional.

Perhitungan dan Analisis Rasio Efektivas dan Efisiensi

Semakin tinggi nilai tingkat efektivitas yang diperoleh atau semakin besar target yang tercapai, semakin dapat dianggap bahwa kinerja entitas pemerintahan tersebut lebih efektif dalam melaksanakan anggaran operasional. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas anggaran operasional, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rosen & Ted (2017), adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Anggaran Operasional: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Rencana Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Menurut (Rosen & Ted, 2017) Kriteria efektivitas anggaran operasional dapat dinilai sebagai berikut :

- 1) 100% Keatas Sangat Efektif
- 2) 90% sampai 100% Kriteria Efektif
- 3) 80% sampai 90% Kriteria Cukup Efektif
- 4) 60% sampai 80% Kriteria Kurang Efektif
- 5) Kurang dari 60% Kriteria Tidak Efektif

Efisiensi merupakan indikator keberhasilan suatu aktivitas yang dinilai berdasarkan sejauh mana biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran tingkat efisiensi biasanya melibatkan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja, yang kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Mahmudi (2010) menyajikan kriteria untuk menilai tingkat efisiensi anggaran operasional sebagai berikut:

- 1) Kurang dari 60% Kriteria Sangat Efisien
- 2) 60% sampai 80% Kriteria Efisien
- 3) 80% sampai 90% Kriteria Cukup Efisien
- 4) 90% sampai 100% Kriteria Kurang Efisien
- 5) 100% Keatas Kriteria Tidak Efisien

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Anggaran Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2

Ringkasan Efektivitas Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2019

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Rencana Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp408.541.732.952.852	Rp332.794.201.578.367	Rp75.747.531.374.485	81%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel .2 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efektivitas Anggaran Operasional

$$\text{Efektivitas Anggaran Operasional: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Rencana Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Rp.332.794.201.578.367}}{\text{Rp.408.541.732.952.852}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas: 81%

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas anggaran operasional di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran berada di bawah rencana anggaran operasional, sehingga tingkat efektivitas anggaran operasional mencapai 81%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019, anggaran operasional untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa di 22 dinas kota Bandung, seperti yang tercatat dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dapat dianggap cukup efektif.

Tabel 3
Ringkasan Efektivitas Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas
Kota Bandung Tahun 2020

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Rencana Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp366.126.347.256.942	Rp306.917.226.601.700	Rp59.209.120.655.242	83%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 3 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efektivitas Anggaran Operasional

$$\text{Efektivitas Anggaran Operasional: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Rencana Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Rp.306.917.226.601.700}}{\text{Rp.366.126.347.256.942}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas: 83%

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas anggaran operasional di atas, dapat diamati bahwa realisasi anggaran operasional lebih rendah dibandingkan dengan rencana anggaran operasional. Oleh karena itu, tingkat efektivitas anggaran operasional mencapai 83%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, anggaran operasional untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa di 22 dinas kota Bandung, sebagaimana yang tercatat dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, masuk ke dalam kriteria cukup efektif.

Tabel 4
Ringkasan Efektivitas Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas
Kota Bandung Tahun 2021

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Rencana Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp419.261.932.232.200	Rp364.674.644.746.058	Rp54.587.287.486.142	86%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 4 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efektivitas Anggaran Operasional

$$\text{Efektivitas Anggaran Operasional: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Rencana Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Rp.364.674.644.746.058}}{\text{Rp.419.261.932.232.200}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas: 86%

Dari perhitungan rasio efektivitas anggaran operasional diatas, dapat dilihat bahwa rencana realisasi anggaran lebih rendah daripada realisasi anggaran operasional sehingga tingkat efektif anggaran belanja sebesar 86% yang berarti tahun 2021 termasuk dalam kriteria cukup efektif untuk membiayai kebutuhan operasional belanja pegawai, dan belanja barang jasa pada 22 dinas kota Bandung yang dituangkan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Tabel 4
Ringkasan Efektivitas Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2022

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Rencana Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp489.806.292.948.000	Rp430.038.789.008.790	Rp59.767.503.939.210	87%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 5 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efektivitas Anggaran Operasional

Efektivitas Anggaran Operasional: $\frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Rencana Realisasi Anggaran}} \times 100\%$

Rasio Efektivitas: $\frac{\text{Rp.430.038.789.008.790}}{\text{Rp.489.806.292.948.000}} \times 100\%$

Rasio Efektivitas: 87%

Dari perhitungan rasio efektivitas anggaran operasional diatas, dapat dilihat bahwa rencana realisasi anggaran lebih rendah daripada realisasi anggaran operasional sehingga tingkat efektif anggaran belanja sebesar 87% yang berarti tahun 2022 termasuk dalam kriteria cukup efektif untuk membiayai kebutuhan operasional belanja pegawai, dan belanja barang jasa pada 22 dinas kota Bandung yang dituangkan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Tabel 5
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Rencana Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja Operasional	Rata-Rata	Kriteria
2019	Rp408.541.732.952.852,00	Rp332.794.201.578.367,00	81%	Cukup Efektif
2020	Rp366.126.437.256.942,00	Rp306.917.226.601.700,00	83%	Cukup Efektif
2021	Rp419.261.932.232.200,00	Rp364.674.644.746.058,00	86%	Cukup Efektif
2022	Rp489.806.292.948.000,00	Rp430.038.789.008.790,00	87%	Cukup Efektif

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa rasio efektivitas anggaran operasional pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sampai tahun 2022 dinilai dengan kriteria cukup efektif dengan predikat lebih dari 80% dan dinilai sesuai dengan rencana atau target realisasi dalam pelaksanaan anggaran operasional. Dengan tingkat persentase pada tahun 2019 yaitu 81% dengan kriteria cukup efektif, pada tahun 2020 yaitu 83% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2021 yaitu 86% dengan kriteria cukup efektif, dan pada tahun 2022 yaitu 87% dengan kriteria cukup efektif.

Tabel 6
Ringkasan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2019

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp431.867.777.377.945	Rp332.794.201.578.367,00	Rp99.073.575.799.578	23%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 7 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efisiensi Anggaran Operasional

Rasio Efisiensi: $\frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Anggaran Operasional}} \times 100\%$

Rasio Efisiensi: $\frac{\text{Rp.332.794.201.578.367}}{\text{Rp.431.867.777.377.945}} \times 100\%$

Rasio Efisiensi: 77%

Selisih Rasio Efisiensi: 23%

Dari perhitungan rasio efisiensi anggaran operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran operasional pada tahun 2019 lebih rendah daripada target anggaran operasional yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tingkat efisiensi anggaran operasional, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sebesar 77% dengan selisih 23%. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 untuk membiayai kebutuhan operasional di 22 dinas kota Bandung masuk ke kriteria sangat efisien.

Tabel 7
Ringkasan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2020

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp355.646.347.256.939	Rp306.917.226.601.700	Rp48.729.120.655.239	14%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 8 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efisiensi Anggaran Operasional

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Anggaran Operasional}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Rp}306.917.226.601.700}{\text{Rp}355.646.347.256.939} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi: 86%

Selisih Rasio Efisiensi: 14%

Dari perhitungan rasio efisiensi anggaran operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran operasional pada tahun 2020 lebih rendah daripada target anggaran operasional yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tingkat efektivitas anggaran operasional, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sebesar 86% dengan selisih 14%. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 untuk membiayai kebutuhan operasional di 22 dinas kota Bandung masuk ke kriteria sangat efisien.

Tabel 8
Ringkasan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas
Kota Bandung Tahun 2021

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp413.388.162.940.360	Rp364.674.644.746.058	Rp48.713.518.194.302	12%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 9 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efisiensi Anggaran Operasional

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Anggaran Operasional}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Rp}364.674.644.746.058}{\text{Rp}413.388.162.940.360} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi: 88%

Selisih Rasio Efisiensi: 12%

Dari perhitungan rasio efisiensi anggaran operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran operasional pada tahun 2021 lebih rendah daripada target anggaran operasional yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tingkat efektivitas anggaran operasional, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sebesar 88% dengan selisih 12%.

Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 untuk membiayai kebutuhan operasional di 22 dinas kota Bandung masuk ke kriteria sangat efisien.

Tabel 9
Ringkasan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2022

Uraian	Jumlah		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Jumlah (Rp)	%
Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung	Rp484.195.292.948.000	Rp430.038.789.008.790	Rp54.156.503.939.210	12%

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 10 Anggaran Belanja Operasional 22 Dinas Kota Bandung dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

- Efisiensi Anggaran Operasional

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Anggaran Operasional}}{\text{Anggaran Operasional}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Rp430.038.789.008.790}}{\text{Rp484.195.292.948.000}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi: } 88\%$$

$$\text{Selisih Rasio Efisiensi: } 12\%$$

Dari perhitungan rasio efisiensi anggaran operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran operasional pada tahun 2022 lebih rendah daripada target anggaran operasional yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tingkat efektivitas anggaran operasional, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sebesar 88% dengan selisih 12%. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 untuk membiayai kebutuhan operasional di 22 dinas kota Bandung masuk ke kriteria sangat efisien.

Tabel 10
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Pada 22 Dinas Kota Bandung Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Anggaran Belanja Operasional	Realisasi Anggaran Belanja Operasional	Rata-Rata	Selisih Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp 431.867.777.377.945,00	Rp 332.794.201.578.367,00	77%	23%	Cukup Efektif
2020	Rp 355.646.347.256.939,00	Rp 306.917.226.601.700,00	86%	14%	Cukup Efektif
2021	Rp 413.388.162.940.360,00	Rp 364.674.644.746.058,00	88%	12%	Cukup Efektif
2022	Rp 484.195.292.948.000,00	Rp 430.038.789.008.790,00	88%	12%	Cukup Efektif

Sumber : BKAD Kota Bandung, Diolah Peneliti, 2023

Dari tabel 11 yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi anggaran operasional pada 22 Dinas Kota Bandung dari tahun anggaran 2019 hingga tahun 2022 dinilai sangat efisien dengan predikat selisih yaitu 15%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

anggaran pada keempat tahun tersebut sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan terealisasi dengan baik dalam pelaksanaan anggaran operasional. Secara lebih rinci, tingkat persentase efisiensi anggaran adalah 23% pada tahun 2019 dengan kriteria sangat efisien, meningkat menjadi 14% pada tahun 2020 dengan kriteria sangat efisien, dan terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 dengan tingkat efisiensi mencapai 12% dan kriteria sangat efisien.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran operasional untuk menilai kinerja 22 Dinas Kota Bandung dengan menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran operasional 22 Dinas Kota Bandung tahun 2019-2022.

Efektivitas Anggaran Operasional 22 Dinas Kota Bandung

Efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Semakin tinggi nilai tingkat efektivitas yang diperoleh atau semakin mendekati atau melebihi target yang telah ditetapkan, semakin dapat diindikasikan bahwa kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan adalah efektif. Hasil penelitian mengenai efektivitas anggaran operasional pada 22 dinas kota Bandung dari tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan fluktuasi, dengan umumnya belum mencapai atau melampaui target anggaran operasional yang telah dianggarkan. Namun, secara keseluruhan, kinerja anggaran ini masih termasuk dalam kategori cukup efektif dengan predikat tingkat efektivitas sebesar 84%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah realisasi anggaran operasional lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah dianggarkan.

Efisiensi Anggaran Operasional 22 Dinas Kota Bandung

Efisiensi, sebagai indikator vital keberhasilan suatu aktivitas, merujuk pada sejauh mana biaya atau sumber daya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai. Proses pengukuran efisiensi dirancang untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin, menggambarkan ketangkasan dan produktivitas suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan mereka. Melibatkan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana alokasi sumber daya digunakan secara efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pada tingkat efektivitas, terlihat bahwa realisasi anggaran operasional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rencana anggaran operasional. Namun, pada tingkat efisiensi anggaran operasional, dengan membandingkan

realisasi anggaran operasional dan anggaran operasional yang telah dianggarkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas anggaran belanja pada 22 Dinas Kota Bandung dari Tahun Anggaran 2019 hingga 2022 umumnya belum mencapai atau melampaui target anggaran operasional yang telah dianggarkan. Meskipun demikian, tingkat efektivitas ini masih masuk dalam kategori cukup efektif dengan predikat 84%. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jumlah realisasi anggaran operasional lebih rendah daripada target anggaran operasional yang telah ditetapkan. Tingkat persentase efektivitas cukup efektif selama tahun anggaran 2019 hingga 2022 adalah sebagai berikut: pada tahun 2019 dengan tingkat persentase sebesar 81%, pada tahun 2020 sebesar 83%, pada tahun 2021 sebesar 86%, dan pada tahun 2022 sebesar 87%.
2. Pada tingkat efisiensi anggaran belanja, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan membandingkan realisasi anggaran operasional dengan anggaran operasional yang telah dianggarkan dari Tahun Anggaran 2019 hingga 2022, dinilai bahwa telah berhasil menghemat anggaran operasional. Tingkat efisiensi ini mendapatkan predikat "sangat efisien" dengan persentase sebesar 15%. Detail tingkat persentase efisiensi adalah sebagai berikut: pada tahun 2019 dengan tingkat persentase sebesar 23%, pada tahun 2020 sebesar 14%, pada tahun 2021 sebesar 12%, dan pada tahun 2022 sebesar 12%.

Saran

1. Diharapkan bahwa semua dinas yang beroperasi di Kota Bandung dapat meningkatkan pelaksanaan anggaran operasional mereka untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.
2. Dalam hal penggunaan anggaran operasional, disarankan agar pendekatan yang lebih optimal diterapkan dalam aspek penggunaan, pengendalian, dan pengawasan anggaran. Dengan demikian, target efisiensi dapat tercapai dengan lebih baik.

REFERENSI

- Bland, R. L., & Nunn, S. (1992). The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. *Public Budgeting & Finance*, 12(2), 32–47. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00936>
- Halim, A., & Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>

Hendra, J. (2018). Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo). *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 8–17. <https://doi.org/10.30741/assets.v2i1.218>

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.

Rosen, H. S., & Gayer, T. (2017). *Public Finance* (4th ed.). New York: McGraw Hill.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.